



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDA KARYA
NOMOR 75 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA SIDA KARYA

PERBEKEL DESA SIDA KARYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau, perlu dilaksanakan modernisasi sistem pelayanan di Desa Sida Karya ;

b. bahwa untuk mewujudkan modernisasi sistem pelayanan tersebut perlu diberlakukan aplikasi yang menunjang sistem pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa Sida Karya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 875);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

14. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 10);
16. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2024 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Sidakarya Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidakarya Tahun 2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2024 Nomor 6);
18. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

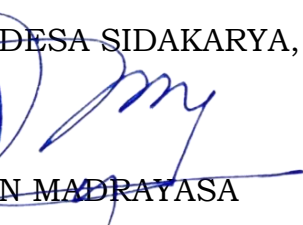
- KESATU : Pengembangan Sistem Informasi Desa Sidakarya berbasis *website* dan/atau aplikasi;
- KEDUA : Pengembangan Sistem Informasi Desa Sidakarya yang dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
1. Aplikasi SIMADE (Sistem Informasi Manajemen Desa) merupakan aplikasi yang dirancang untuk membantu sistem pelayanan administrasi surat menyurat secara cepat dan efisien, mengolah data kependudukan dan profil demografi Desa;
 2. Aplikasi LogBook merupakan aplikasi yang digunakan untuk melaporkan kegiatan harian yang dilakukan oleh Perangkat Desa kepada *Perberekel*;
 3. Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan umpan balik dari masyarakat mengenai tingkat kepuasan terhadap layanan Pemerintahan Desa;
 4. Website Desa merupakan representasi Pemerintah Desa yang dapat mempermudah dalam penyebaran informasi Desa, transparansi penggunaan anggaran dan pembangunan Desa, hingga akses layanan-layanan yang disediakan oleh Pemerintah Desa;
 5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan portal *online* yang memuat produk hukum dan dokumentasi hukum lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat.
 6. Aplikasi Pengaduan Warga merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan pengaduan dan/atau penyampaian kritik/saran kepada Pemerintah Desa.

7. Aplikasi Posyandu merupakan sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk pencatatan kegiatan posyandu seperti pencatatan tumbuh kembang balita, pemberian vitamin, dan lainnya.
8. Aplikasi Persampahan merupakan sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk mengelola data pelanggan swakelola kebersihan, pencatatan iuran pembayaran kebersihan dan tunggakan, serta rekapitulasi hasil pendapatan dari iuran.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Sidakarya Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidakarya
pada tanggal 11 Pebruari 2025


PERBESKEL DESA SIDA KARYA,

I WAYAN MADRAYASA

Tembusan :

1. Camat Denpasar Selatan
2. Ketua BPD Desa Sidakarya
3. Arsip